































cabang maksimal Rp 100 juta, kalau lebih dari Rp 100 juta maka bagian akad diserahkan kepada komite pusat. Komite pusat maksimal Rp 500 juta. Apabila lebih dari Rp 500 juta maka diserahkan kepada komite pengurus (harus ada pemberitahuan dari pengurus).

Setelah akad tersebut dicetak oleh bagian *teller* / kasir maka kepala capem akan membacakan poin-poin pentingnya saja dalam surat akad tersebut dikarenakan surat akad tersebut ada 3-4 lembar yang berisi aturan-aturan, pasal-pasal, seperti jangka waktu, definisi akad, plafon pembiayaan, sebab akibat jika mengalami pembiayaan bermasalah, dan lain-lain. Setelah itu baru dibacakan oleh kepala capem poin-poin terpenting dalam surat akad tersebut, meliputi akad yang dipakai, plafon pembiayaan, jangka waktu yang diajukan, jumlah angsuran, dan akibat jika mengalami tunggakan. Biasanya saksi diambilkan dari suami atau istri. Setelah dijelaskan semuanya kemudian *debitur* menyetujuinya maka baru dilakukan akad bersama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

“Pertamanya itu pengajuan sesuai prosedur, kemudian di survei oleh teman-teman, setelah di survei, di proses, acc dan gak nya tergantung teman-teman, setelah itu kita panggil ke kantor untuk acc, untuk acc, baru di kantor mereka kan bawa bpkb aslinya dan motornya maka kita cek keaslian dari pada dua barang tadi yang mau digunakan jaminan salah satunya tapi biasanya di sini menerima, mereka hanya serahkan bpkbnya atau surat kendaraan bermotornya tadi, bukan motornya. Ketika setelah itu kita kasih ke *teller* / kasir untuk mengentry data pembiayaan tadi sesuai pengajuan tadi mencakup plafon, jangka waktu, dan jaminan beserta jenis keperluan yang mau digunakan untuk pembiayaan tadi. Digunakan untuk apa dibuat sesuai keperluannya. Setelah kita proses sesuai dari pada pengajuan tadi, terus kita akad *bay’ al-wafā’* maka kita pasrahkan ke bagian akad.















debitur itu enggan menulis laporan keuangan secara rinci. Menurut pihak BMT bagi hasil pada akad *mudārabah* bukan berupa nominal melainkan berupa persentase sehingga setiap bulannya bagi hasil yang diterima BMT berubah-ubah atau tidak menentu, bergantung kepada pendapatan yang diperoleh anggota. Jadi, anggota (*debitur*) enggan untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya dengan bagi hasil berubah-ubah. Berbeda halnya apabila usaha yang dijalankan *debitur* mendapatkan penghasilan musiman, seperti petani sawah atau petani tambak yang mana setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali mendapatkan penghasilan sehingga petani tidak merasa dibebankan apabila membuat laporan keuangan 3 bulan atau 4 bulan sekali. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

“Kebiasaan kalau memang akad *mudārabah* atau *mushārahah* itu kan harus rinci masalah laporan keuangannya. Jadi terkadang *debitur* itu enggan menulis rincian laporan keuangan. Karena apa ? karena kalau akad *mudārabah* itu bagi hasil yang kita minta bukan berupa nominal tapi berupa persen, jadi belum jelas, kalau persen itu kan belum jelas. Jadi persen itu tadi dari keuntungan yang sudah didapat dari orang yang menjalankan usaha dalam artian hal ini adalah anggota. Jadi nanti misalkan keuntungan di bulan ini 1 juta maka sudah ketemu 600ribu untuk anggota, 400ribu untuk BMT. kemudian keuntungan bulan depan beda lagi misalkan keuntungannya 1,5 juta, maka ngitung lagi. Jadi terkadang *debitur* atau anggota itu enggan mau menghitung laporan keuangannya. Baru kalau modal itu tadi digunakan oleh usaha yang musiman. Artinya usaha yang musiman seperti petani sawah atau petani ikan itu kan gak setiap bulan pasti panen, paling gak lah 3-4 bulan lah panen. Jadi 4 bulan itu tadi kita nerima keuntungan dari mereka. Jadi kita nerima keuntungan dari mereka bukan setiap bulan tergantung masa panen di *debitur* itu. Jadi itung-itungannya kan gak setiap bulan. Jadi















